
**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DAN MASYARAKAT INFORMASI
(Studi Kasus Kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat
Informasi di Kota Magelang)**

**COMMUNITY INFORMATION GROUPS AND THE INFORMATION SOCIETY
(Case Study of the Contribution of Community Information Groups in Creating an Information
Society in Magelang City)**

Ari Mukti^{1*}

Rizza Arge Winanta²

*1 Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Kota
Magelang, Jawa Tengah,
Indonesia

² Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Kota
Magelang, Jawa Tengah,
Indonesia

email: arimukti@untidar.ac.id

Abstrak

Tulisan ini ingin menguraikan kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam pengembangan masyarakat informasi di Kota Magelang. Pengembangan kota jasa yang berbasis teknologi informasi perlu didukung dengan kesiapan masyarakat berkarakteristik sebagai masyarakat informasi. Mereka adalah entitas yang memiliki kebutuhan informasi tinggi, mampu menerapkan teknologi informasi pada berbagai bidang, dan mampu bertukar data digital secara cepat dalam jarak jauh. Saat ini Pemerintah Kota Magelang tengah berkomitmen dalam penerapan *smart city*, didukung dengan sebuah Aplikasi Magelang Cerdas yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan. Namun demikian respon masyarakat masih rendah, sehingga perlu dukungan KIM dalam mendorong keberhasilan program pemerintah daerah. Persoalan dikaji secara deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Kota Magelang. Informan merupakan pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan pengurus KIM yang dipilih secara purposif. Temuan penelitian menyatakan bahwa KIM berkontribusi dalam mendiseminasikan program pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian upaya yang dilakukan kurang optimal disebabkan oleh faktor koordinasi, sumber daya manusia, prioritas kegiatan, dan anggaran.

Kata Kunci:

Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM),
Masyarakat Informasi

Keywords:

Community Information Group
Information Society

Accepted

June 2021

Published

October 2021

Abstract

This paper aims to describe the contribution of Community Information Group in the development of the information society. The development of an information technology based service city, needs to be supported by community readiness. They are entities who have high information needs, able to apply information technology in various fields, and able to exchange digital data quickly over long distances. Currently, the Magelang City Government is committed to implementing a Smart City, supported by Magelang Cerdas Application, that makes it easier for the public to access local information and public services. However, community response is still low, so community information groups need support in encouraging the success of local government programs. The problem is studied descriptively qualitatively, by taking the location in Magelang City. Informants are officials of the Communication Informatics dan Statistics Agency and also management of Community Information Group who were chosen purposively. Research findings state that Community Information Group contributes in disseminating government programs to the community. However, the efforts made were less than optimal due to coordination factors, lack of human resources competence, priority issue, and budget issue.

PENDAHULUAN

Era informasi membawa sebuah tatanan kehidupan yang mengedepankan teknologi dan informasi sebagai komponen utama dalam segala aspek kehidupan (Webster, 2006). Kualitas hidup, perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada tinggi rendahnya pemanfaatan informasi. Standar hidup, pola kerja, sistem pendidikan, serta pemasaran barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Sehingga informasi dapat dikatakan sebagai “ruh” dari roda kehidupan (Damanik, 2012). Masyarakat informasi dicirikan dengan adanya kebutuhan informasi yang tinggi, mampu menerapkan Teknologi Informasi (TI) pada berbagai bidang, dan mampu bertukar data digital secara cepat dalam jarak jauh (Straubhaar & LaRose, 2006).

Tumbuhnya masyarakat informasi di Kota Magelang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi *Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025. Arah kebijakan visi ini yaitu pemberlakuan mekanisme kerja berbasis teknologi informasi di lingkup internal dan membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk pengembangan informasi, ilmu pengetahuan, media usaha (promosi), kolaborasi, dan integrasi di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui fasilitas internet. Visi tersebut didukung oleh keberadaan sektor teknologi dan telematika sebagai salah satu sektor andalan Kota Magelang berdasarkan pemetaan daya saing daerah tahun 2020 (Sakti & Arifin, 2021).

Upaya mewujudkan terciptanya masyarakat informasi di Kota Magelang dilakukan melalui penerapan e-government dalam bentuk website dan aplikasi

Magelang Cerdas (Hariyanto, 2017; Kurniasih & Wismaningtyas, 2020). Fitur yang disediakan antara lain pelayanan pengaduan, pajak daerah, perizinan, informasi publik, akses data, administrasi kependudukan, pengurusan surat izin mengemudi, konsultasi dokter, BPJS, internet banking, berita daerah, produk lokal, dan informasi harga kebutuhan pokok. Kota Magelang juga memiliki komitmen dalam penerapan *smart city* yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan sebagai Kota Cerdas dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) tahun 2015, penghargaan atas berbagai rating kesiapan Kota Cerdas tahun 2017, dan peringkat 25 besar Kota Cerdas di Indonesia tahun 2019.

Meskipun *e-government* dan *smart city* sudah berjalan, masih terdapat persoalan yaitu belum optimalnya dukungan dari masyarakat terhadap sarana prasarana yang disediakan. Hasil riset terhadap penggunaan Aplikasi Magelang Cerdas menunjukkan adanya penggunaan pada tingkatan rendah karena kebanyakan pengguna hanya didorong oleh keingintahuan saja, meski sudah dilakukan sosialisasi melalui media cetak maupun radio (Hardi & Mahendradi, 2020; Pangestiningrum et al., 2019).

Keberhasilan pengembangan TI perlu ditopang oleh kesiapan masyarakat (Straubhaar & LaRose, 2006; Webster, 2006; Damanik, 2012). Pemanfaatan TI yang ada juga harus berada pada taraf yang tinggi agar tidak menjadi problematika jika tingkat pemanfaatannya rendah (Ragnedda & Muschert, 2017). Oleh karena itulah peran KIM sangat krusial untuk mendorong terwujudnya masyarakat informasi. Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019, KIM dikembangkan dan diberdayakan sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik. Keberadaan KIM berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi dalam masyarakat (Sunuantari et al., 2015). Kota

Magelang memiliki 18 KIM yang meliputi 1 KIM tingkat kota 17 KIM tingkat kelurahan. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini akan mengulas sejauh apa kontribusi KIM dalam mendukung pengembangan masyarakat informasi di Kota Magelang.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji aktivitas KIM yang dikaitkan pada peran sebagai sumber informasi (Faris & Muyasaroh, 2015), perwujudan desa mandiri (Kasiatik & Nasution, 2015), pembentukan etika dan pembentukan potensi desa (Alfianti & Darajat, 2018), pola komunikasi (Budhirianto, 2015; Herdono & Mutqiyah, 2019) implementasi kebijakan (Kasiyanto, 2017; Siraj & Maulidina, 2018) pemberdayaan kelompok (Maryatun & HS, 2015; Julika & Irawati, 2016; Makkarana et al., 2017; Hidayattullah et al., 2019), proses komunikasi (Chernova & Rinawati, 2016), analisis jaringan komunikasi (Din, 2018) dan literasi jurnalisme (Saepullah & Rustandi, 2020). Sementara penelitian sejenis yang mengkaitkan antara KIM dengan pencapaian masyarakat informasi telah dilakukan oleh Sunuantari et al., (2015) dan Sari (2017) namun pada lokasi yang berbeda yaitu di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Timur.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kota Magelang. Informan ditentukan secara purposive dengan memilih informan yang dianggap memiliki keterkaitan serta memahami akan persoalan yang diteliti. Para informan tersebut diantaranya yaitu Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominsta) Kota Magelang, ketua dan sekretaris KIM tingkat kota, dan ketua KIM dari 17 kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi KIM

Peran KIM dalam mengembangkan masyarakat informasi dikaji dikarenakan latar belakang pembentukan KIM memang diarahkan pada pemberdayaan bidang informasi. Keberadaan KIM diharapkan mampu berfungsi sebagai agen perubahan dan jaringan informasi masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KIM memiliki peluang menghasilkan daya dukung yang optimal bagi terwujudnya masyarakat informasi. Mereka dapat mengakses berbagai media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini KIM tidak hanya mengakses informasi dari berbagai sumber tetapi juga melakukan pengolahan informasi, yaitu memilih dan memilah informasi yang baik dan bermanfaat. Proses pengolahan informasi yang dimaksud meliputi pencarian informasi dari beragam media, mengolah informasi melalui diskusi, mengembangkan jaringan sosial, menyebarkan informasi yang telah diolah, dan melaksanakan advokasi masyarakat ke lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta (Puslitbang Aptika & IKP, 2015).

Keseluruhan rangkaian tersebut terangkum dalam aktivitas ADINDA yang meliputi 1) Akses informasi, dari berbagai sumber secara langsung maupun tidak langsung, 2) Diskusi, untuk saling bertukar informasi dalam memecahkan masalah 3) Implementasi, melalui penerapan dan pendayagunaan informasi yang diperoleh, 4) Networking, dengan membangun jaringan dengan kelompok/ lembaga / instansi sebagai sarana pertukaran informasi, 5) Diseminasi informasi, dengan menyebarkan informasi yang telah diolah kepada lingkungan sekitar, dan 6) Aspirasi, melalui aktivitas penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat (Puslitbang Aptika & IKP, 2015).

Aktivitas KIM Kota Magelang

Berdasarkan dimensi ADINDA, pemberdayaan KIM diarahkan untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di dalam masyarakat melalui pengolahan informasi sehingga tersedia untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih dari itu, KIM dapat memberikan filter atas derasnya arus informasi yang masuk ke masyarakat. Para pengurus KIM Kota Magelang memahami tugas dan fungsi tersebut sebagai “Corong Informasi Masyarakat”. Berangkat dari hal itulah maka aktivitas KIM Kota Magelang lebih cenderung berupa sosialisasi terhadap berbagai bidang yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Disamping itu juga dilakukan aktivitas yang bersifat internal untuk mengembangkan kapasitas pengurus. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan KIM selama kurun waktu 2016 – 2020 antara lain :

Tabel 1. Aktivitas KIM

No	Kegiatan	Bidang
1	Sosialisasi Anti Narkoba	Kesehatan
2	Sosialisasi HIV AIDS	Kesehatan
3	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Kesehatan
4	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih	Kesehatan
5	Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid	Kesehatan
6	Sosialisasi Parenting	Ketahanan Keluarga
7	Sosio drama Penanggulangan KDRT	Ketahanan Keluarga
8	Sosialisasi Pengurusan PIRT bagi UMKM	UMKM
9	Bazar UMKM Perwakilan Kelurahan dalam acara jalan sehat	UMKM
10	Studi banding KIM Kampung Organik ke Boyolali	Lingkungan
11	Pelatihan Pembuatan Vlog	Teknologi Informasi
12	Pelatihan Blogger	Teknologi Informasi
13	Kepesertaan Sosialisasi Masyarakat Informasi	Teknologi Informasi
14	Sosialisasi Pemilu	Politik

Sumber : Wawancara dan Dokumentasi

Semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai wujud dari penerapan ADINDA, meskipun pada aspek Apirasi belum dapat terlaksana. Pengurus KIM secara umum telah memahami fungsi utamanya untuk melakukan diseminasi informasi. Oleh karenanya beberapa

bidang sosialisasi tersebut dipilih berdasarkan atas diskusi pengurus, dengan memperhatikan kebutuhan dan urgensi yang ada di Kota Magelang.

Dalam usahanya melaksanakan fungsi diseminasi informasi kepengurusan KIM juga membangun networking dengan pihak – pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Diskominsta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Konsultan Keluarga PAM Coach, serta Pengurus KIM Kabupaten Boyolali. Pengurus KIM juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada lingkungan masing-masing. Umumnya mereka merangkap sebagai pengurus pada lembaga di tingkat kelurahan seperti RT, RW, LPM, dan PKK, sehingga pengurus KIM lebih dekat kepada masyarakat disekitarnya.

Peran KIM Dalam Pengembangan Masyarakat Informasi

Sebagai komunitas binaan Diskominsta, keterlibatan KIM dalam membangun masyarakat informasi Kota Magelang diwujudkan melalui edukasi penggunaan Aplikasi Magelang City dan perkembangan masyarakat informasi kepada masyarakat Kota Magelang. Aktivitas ini diawali dengan keikutsertaan pengurus KIM baik tingkat kota maupun kelurahan dalam sosialisasi perkembangan masyarakat informasi pada bulan September 2019 di Gunung Tidar. Penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada pengurus KIM mengenai perkembangan teknologi informasi. Beberapa hal yang diulas dalam pertemuan tersebut antara lain perkembangan masyarakat informasi terkini, perubahan tatanan sosial menuju era informasi, serta penyediaan dan

pemanfaatan Aplikasi Magelang Cerdas oleh pemerintah kota.

Berkembangnya masyarakat informasi di Kota Magelang dalam waktu dekat diharapkan mampu mendukung program *smart city*, dimana Aplikasi Magelang Cerdas merupakan bagian dari penerapan *smart governance* yang menyediakan akses pelayanan publik secara online bagi user. Disamping itu Diskoimsta merasa perlu melaksanakan sosialisasi ini dikarenakan melihat rendahnya animo masyarakat untuk mengakses aplikasi tersebut. Hingga saat ini jumlah pengunduh melalui Google Play Store baru mencapai 5.000 kali (Hardi & Mahendrati, 2020), belum sebanding dengan jumlah penduduk serta penggunaan *smart phone* di Kota Magelang.

Langkah berikutnya, KIM melakukan diseminasi informasi dalam bentuk edukasi kepada masyarakat atas seluruh materi yang disampaikan oleh Diskominsta. Secara teknis, KIM tingkat kota menghimbau kepada pengurus di tingkat kelurahan untuk menyampaikan hasil sosialisasi tersebut pada forum-forum pertemuan warga. Selanjutnya KIM kelurahan secara personal melaksanakan edukasi pada pertemuan PKK maupun rapat RT yang mereka ikuti di lingkungan masing – masing.

Hasil telaah lapangan menemukan adanya kelemahan dari metode diseminasi informasi yang telah dijalankan, yaitu ketika kegiatan *follow up* sosialisasi berhenti di lingkungan masing-masing. Pengurus hanya menyampaikan informasi pada pertemuan RT atau PKK yang diikutinya, namun kemudian tidak menyampaikan pada wilayah RT lain. Sebagaimana diketahui jumlah pengurus KIM di tingkat kelurahan tidak sebanding dengan jumlah wilayah RT, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pengurus KIM dan Jumlah RT

No	Kelurahan	Jumlah	
		Pengurus KIM	Wilayah RT
1	Jurangombo Utara	8	37
2	Jurangombo Selatan	8	47
3	Magersari	8	75
4	Tidar Utara	8	55
5	Tidar Selatan	8	45
6	Rejowinangun Selatan	8	67
7	Magelang	8	52
8	Kemirirejo	8	57
9	Cacaban	8	74
10	Rejowinangun Utara	8	91
11	Panjang	8	59
12	Gelangan	8	64
13	Wates	8	80
14	Potrobangsan	8	64
15	Kedungsari	8	58
16	Kramat Utara	8	39
17	Kramat Selatan	8	52

Sumber : wawancara dan dokumentasi

Ketika diseminasi hanya dilakukan pada lingkungan masing – masing, maka terdapat beberapa kelompok masyarakat di wilayah lain yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Bahkan terdapat pengurus KIM kelurahan yang tidak mengetahui perihal kegiatan sosialisasi bersama Diskominsta di Gunung Tidar karena tidak menghadiri undangan. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan edukasi juga belum dilakukan oleh pengurus KIM kota maupun kelurahan sehingga tidak dapat diketahui tingkat keterjangkauan informasi yang disampaikan. Selain itu juga ditemukan persoalan lain dimana terdapat kepengurusan KIM di beberapa kelurahan mengalami kevakuman, seperti pada kelurahan Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurang Ombo Utara, Rejo Winangun Utara.

Faktor Penghambat

Terlepas dari berbagai persoalan di atas, terdapat beberapa faktor internal yang menghambat ergerakan KIM sebagai berikut :

a. Kurangnya Koordinasi

Persoalan ini bermula dari pola hubungan antara KIM tingkat kota dengan kelurahan, dimana keduanya tidak memiliki garis komando secara hierarkis, karena keduanya terpisah secara kelembagaan. Hal ini terlihat pada struktur organisasi KIM tingkat kota yang tidak mencantumkan kepengurusan di tingkat kelurahan. Pengurus KIM kota dibentuk oleh walikota dengan pengelolaan berada di bawah koordinasi Diskoinsta, sementara KIM tingkat kelurahan berada di bawah koordinasi kelurahan. Meskipun beberapa pengurus KIM kota juga merangkap sebagai pengurus di tingkat kelurahan, namun keduanya tidak berada dalam satu kesatuan organisasi. Dengan demikian hubungan keduanya hanya bersifat koordinatif. Pemisahan ini sebetulnya ditujukan untuk mewujudkan KIM yang otonom agar mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, akan tetapi juga dapat menjadi penghambat dalam upaya penyikapan terhadap isu-isu strategis tingkat kota sehingga menjadi kurang efektif.

b. Persoalan Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah komunitas, sebetulnya KIM diharapkan mampu berfungsi secara efektif sebagai agen perubahan masyarakat dan jaringan diseminasi informasi. Bahkan KIM memiliki peluang menghasilkan daya dukung optimal bagi terwujudnya masyarakat informasi (Puslitbang Aptika dan IKP Kominfo, 2015). Arah kelembagaan yang demikian menuntut adanya personal KIM yang memiliki kemampuan tinggi di

bidang TI. Akan tetapi kondisi yang ada, baik KIM kota maupun kelurahan belum memiliki pengurus yang handal di bidang tersebut. Hingga saat ini pemanfaatan TI masih sebatas pada penggunaan media sosial whatsapp, dan youtube. Sebetulnya KIM sangat menginginkan keberadaan pengurus yang masih usia muda atau setidaknya lancar TI, namun hal ini sulit ditemukan. Prosentase pengurus lebih cenderung didominasi oleh usia senior, sedang jumlah kaum muda hampir tidak ada.

c. Prioritas Kegiatan

Fungsi utama KIM sebagai pengelola informasi dilakukan melalui penggalian informasi, pemrosesan, dan diseminasi. Informasi dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga KIM akan memilih informasi berdasarkan tingkat urgensi. Diseminasi informasi yang kurang terkoordinir dikarenakan memang bidang TI belum menjadi prioritas program kerja. Selama beberapa tahun belakangan KIM Kota Magelang lebih banyak menangani diseminasi informasi bidang kesehatan dan UMKM. Sebagaimana yang dilakukannya pada tahun 2016, KIM Kota Magelang menampilkan stand UMKM pada kegiatan jalan sehat. Kemudian di tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan HIV-AIDS bagi siswa sekolah menengah, sosialisasi bidang ketahanan keluarga melalui sosiodrama, serta capacity building pengurus. KIM Kota juga bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelenggarakan sosialisasi pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Sementara kegiatan yang mengarah pada penguasaan IT maupun pengelolaan informasi belum banyak dilakukan, kecuali satu kegiatan pembuatan vlog (video dokumenter pendek) pada saat studi

banding ke KIM Kabupaten Boyolali. Pada tingkat kelurahan, KIM belum banyak melaksanakan kegiatan. Aktivasinya cenderung kepada menghadiri undangan pertemuan atau kegiatan dari Pemerintah Kota Magelang maupun KIM Kota.

d. Anggaran

Program kerja dan kegiatan KIM Kota Magelang selama ini bergerak berdasarkan atas anggaran pemerintah daerah yang diberikan melalui Diskominsta. Kegiatan edukasi penggunaan Aplikasi Magelang Cerdas belum masuk dalam pengajuan anggaran kegiatan KIM tahun 2020, sehingga diseminasi informasi tersebut belum menjadi kegiatan yang diutamakan.

Beberapa persoalan tersebut sebetulnya tidak hanya dialami oleh kepengurusan KIM di Kota Magelang. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari, 2017), penilaian atas keterkaitan aktivitas KIM terhadap tingkat pencapaian masyarakat informasi di Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa ternyata kondisi masyarakat masih jauh dari harapan terwujudnya masyarakat informasi, baik di wilayah urban maupun rural. Hal ini dikarenakan KIM masih kurang maksimal dan masih mendapatkan banyak kendala. Kondisi yang sama juga dilaporkan dalam penelitian tentang KIM di daerah lain. Berbagai persoalan yang ditemui antara lain masih dikelolanya KIM secara konvensional sehingga belum memanfaatkan perangkat teknologi informasi secara optimal (Yalia, 2015; Kasiyanto, 2017; Sari, 2017), belum adanya program kerja yang spesifik dan berkelanjutan (Julika & Irawati, 2016), belum mampu melakukan pengelolaan informasi sesuai tahapan ADINDA (Makkarana et al., 2017), kurangnya pemahaman pengurus terkait tugas dan fungsinya (Siraj & Maulidina, 2018), dan adanya persepsi di kalangan pengurus bahwa KIM berfungsi sebagai

perpanjangan tangan dan penerus informasi dari pemerintah (Puslitbang Aptika & IKP, 2015).

Melihat semakin derasnya arus informasi saat ini, maka peran KIM akan semakin dibutuhkan. Bukan tidak mungkin KIM dapat menjadi kelompok masyarakat unggulan. Suraji (1983) menyatakan bahwa model kelompok masyarakat memiliki kelebihan tersendiri, yaitu mereka akan selalu berfasilitas untuk diskusi, sehingga dapat memberikan benefit bagi anggotanya. Bahkan kelompok – kelompok masyarakat tersebut sangat berguna untuk berbagai hal, tidak hanya di bidang garapnya, namun juga menyangkut berbagai hal lain yang berkaitan dengan nasib kelompok tersebut. Kebermanfaatan kelompok masyarakat terhadap anggotanya dapat ditemukan pada berbagai bidang, seperti peningkatan kesehatan (Yadav et al., 2013; Umiasih & Handayani, 2017; Zaitsu et al., 2018; Solnes Miltenburg et al., 2019; Hayashi et al., 2021; Lee & Nakamura, 2021) peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lyons et al., 2016; Sarjiyanto, 2017; Mafruhah & Istiqomah, 2017; Lindsay-Smith et al., 2018), peningkatan kualitas lingkungan (Martuti et al., 2018; Sun et al., 2019), peningkatan kesadaran hukum (Hardiana et al., 2020), peningkatan kesiapan mitigasi bencana (Wardyaningrum, 2015), hingga peningkatan kesiapan menghadapi masa pensiun (Stancliffe et al., 2015).

Kontribusi positif KIM dalam pengembangan masyarakat informasi telah dicontohkan oleh (Sunuantari et al., 2015). Dalam kajiannya di Kraton Kidul Kota Pekalongan KIM tingkat kelurahan telah mampu menjembatani kesenjangan informasi di masyarakat dengan cara menformulasikan semua informasi yang dibutuhkan dan mendiseminasikan kepada masyarakat melalui sarana musik Islam, *woro-woro*, koran kampung, radio lokal, internet, selebaran, pameran, dan perpustakaan kampung. Masyarakat

sekitar telah merasakan kebermanfaatan KIM dalam menyajikan info-info *up to date*, berdasarkan 100 responden yang disurvei.

KESIMPULAN

Kontribusi KIM terhadap pengembangan masyarakat informasi di Kota Magelang telah dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIM berperan dalam diseminasi informasi dalam bentuk edukasi Aplikasi Magelang Cerdas yang disampaikan melalui forum pertemuan RT dan PKK. Namun demikian kegiatan tersebut tidak berjalan optimal. Pengurus KIM hanya melakukan diseminasi secara personal di lingkungan masing-masing sehingga tidak semua wilayah memperoleh informasi. Selain itu juga terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi KIM, antara lain kurangnya koordinasi, pengurus belum menguasai TI, serta belum adanya prioritas dan penganggaran kegiatan di bidang TI. Perlu adanya kajian lebih lanjut untuk menyusun model pengelolaan dan pemberdayaan KIM. Keberadaan model / *framework* sangat penting sebagai acuan pengelolaan KIM secara nasional, mengingat ketidakefektifan aktivitas KIM tidak hanya di Kota Magelang, namun juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Tidar yang telah memberikan anggaran penelitian, dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, serta KIM Kota Magelang yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

REFERENSI

Alfianti, M. D., & Darajat, A. H. (2018). Peran Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Pembentukan Etika Dan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Karangsono. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1),

47–60.

Budhirianto, S. (2015). Pola Komunikasi untuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Program Swasembada Pangan *Patterns of Communication for Empowerment Group Information Society in Food Self Sufficiency Program in The Successful. Jurnal Pekommas*, 18(2), 127–138.

Chernova, R., & Rinawati, R. (2016). *Proses Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Agen Informasi Kota Bandung*. 179–182.

Damanik, F. N. S. (2012). Menjadi Masyarakat Informasi. *JSM (Jurnal SIFO Mikroskil)*, 13(1), 73–82.

Din, N. I. (2018). Analisis Jaringan Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mojo Kota Surabaya. *Commercium*, 02(02), 1–4.

Faris, & Muyasaroh, S. (2015). Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Sumber Informasi Potensi Lokal Dan Kearifan Budaya Kabupaten Pasuruan. *Heritage*, 3(01), 1–12.

Hardi, W., & Mahendradi. (2020). Peningkatan Kapasitas Aplikasi Mobile “Magelang Cerdas” dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. *JPALG (Journal of Public Administration and Local Governance)*, 4(2), 124–140.

Hardiana, I., Nurmalisa, Y., & Putri, D. S. (2020). Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Program PTSL di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 9(1).

Hariyanto, B. A. I. S. (2017). The Implementation of E-Government at Local Government in Magelang City 2017 (Case Study: Magelang Cerdas Application). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Thesis*.

Hayashi, C., Ogata, S., Okano, T., Toyoda, H., & Mashino, S. (2021). Long-term participation in community group exercise improves lower extremity muscle strength and delays age-related declines in walking speed and physical function in older adults. *European Review of Aging and Physical Activity*, 18(1), 1–10.

Herdono, I., & Mutqiyah, R. (2019). Pola Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prigen Pasuruan Dalam Penyebaran Informasi Ke

- Masyarakat. *Mediakom*, 3(1). 153.
- Hidayattullah, M. F., Abidin, T., Wijayanto, S., & Hapsari, Y. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Paguyuban Turah Runtah Di Sumur Panggang Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Julika, S., & Irawati, I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Public Corner*, 11(2).
- Kasiatik, & Nasution, I. (2015). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 3(2), 103–115.
- Kasiyanto .(2017). Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Daerah Tertinggal Di Jawa Timur Dalam Penyebarluasan Informasi. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(2).
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). Smart City Kota Magelang : Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2).
- Lee, A., & Nakamura, K. (2021). Engaging diverse community groups to promote population health through healthy city approach: Analysis of successful cases in western pacific region. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12).
- Lindsay-Smith, G., O’Sullivan, G., Eime, R., Harvey, J., & Van Uffelen, J. G. Z. (2018). A mixed methods case study exploring the impact of membership of a multi-activity, multicentre community group on social wellbeing of older adults. *BMC Geriatrics*, 18(1), 1–15.
- Lyons, A., Fletcher, G., Farmer, J., Kenny, A., Bourke, L., Carra, K., & Bariola, E. (2016). Participation in rural community groups and links with psychological well-being and resilience: A cross-sectional community-based study. *BMC Psychology*, 4(1), 1–11.
- Mafruhah, I., & Istiqomah, N. (2017). The Analysis of Community Empowerment Process through Poor Community Group (The Comparative Study of Pilot and Replication Areas). *GATR Journal of Management and Marketing Review*, 2(3), 148–
- Makkarana, A., Cangara, H., & Ali, S. A. (2017). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Saluran Berbagi Informasi Penangkapan Telur Ikan Terbang Di Kabupaten Majene Dan Polman. *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2).
- Martuti, N. K. T., Susilowati, S. M. E., Sidiq, W. A. B. N., & Mutiatari, D. P. (2018). Peran Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2).
- Maryatun, M., & Hs, L. (2015). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Turi Dan Kecamatan Gamping, Kabupaten. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(1).
- Pangestiningrum, K. P., Nugraha, J. T., & Mahendrati. (2019). Manajemen Aplikasi “Magelang Cerdas” Sebagai Salah Satu Inovasi Sektor Publik menuju Smart City di Kota Magelang. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 24–36.
- Puslitbang Aptika & IKP. (2015). Kelompok Informasi Masyarakat : Potret, Inspirasi, Jejaring. Jakarta : Kominfo.
- Ragnedda, M., & Muschert, G. W. (2017). Introduction. In *Theorizing Digital Divides*.
- Saepullah, U., & Rustandi, D. (2020). Literasi Jurnalisme Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 25–46.
- Sakti, A. B., & Arifin, M. Z. (2021). Menakar Daya Saing Daerah Kota Magelang Tahun 2020. *Jendela Inovasi Daerah*, IV(1), 17–35.
- Sari, R. P. (2017). Pencapaian Masyarakat Informasi Ditinjau Melalui Implementasi Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM): Studi Kasus Implementasi Program KIM Di Jawa Timur. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 13(1),
- Sarjiyanto. (2017). Peran Kelompok Masyarakat (Kube Lumbung Sinergi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Bulakan Sukoharjo Jawa Tengah. *JIEP*, 17(1), 41–54.
- Siraj, N., & Maulidina, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Studi

- Pada Kelompok Informasi Masyarakat di Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(11), 129–137.
- Solnes Miltenburg, A., van Pelt, S., de Bruin, W., & Shields-Zeeman, L. (2019). Mobilizing community action to improve maternal health in a rural district in Tanzania: lessons learned from two years of community group activities. *Global Health Action*, 12(1).
- Stancliffe, R. J., Bigby, C., Balandin, S., Wilson, N. J., & Craig, D. (2015). Transition to retirement and participation in mainstream community groups using active mentoring: A feasibility and outcomes evaluation with a matched comparison group. *Journal of Intellectual Disability Research*, 59(8), 703–718.
- Sun, C.-Y., Chen, Y.-A., & Zhang, X. (2019). Key Factors in the Success of Eco-Communities in Taiwan's Countryside: The Role of Government, Partner, and Community Group. *Sustainability*, 11(4), 1208.
- Sunuantari, M., Bajari, A., Damayani, N. A., & Hubeis, M. (2015). Membangun Masyarakat Informasi Berbasis Kelompok. *Wacana*, XIV(4), 355–371.
- Umiasih, S., & Handayani, O. W. K. (2017). Peran Serta Kelompok Masyarakat Peduli Paru Sehat Dalam Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis. *Higeia Journal of Public Health*, 1(1), 1–7.
- Wardyaningrum, D. (2015). Fungsi Komunikasi Kelompok Dalam Menghadapi Potensi Bencana Alam (Studi pada Anggota Kelompok Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana Gunung Berapi). *Communication*, 6(2).
- Webster, F. (2006). Theories of The Information Society. In *Routledge* (3rd ed.).
- Yadav, D., Ramanathan, S., Goswami, P., Ramakrishnan, L., Saggurti, N., Sen, S., George, B., & Paranjape, R. (2013). Role of Community Group Exposure in Reducing Sexually Transmitted Infection-Related Risk among Female Sex Workers in India. *PLoS ONE*, 8(10), 1–8.
- Yalia, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(1).
- Zaitsu, M., Kawachi, I., Ashida, T., Kondo, K., & Kondo, N. (2018). Participation in Community Group Activities Among Older Adults: Is Diversity of Group Membership Associated With Better Self-rated Health? *Journal of Epidemiology*, 28(11), 1–6.